

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELURAHAN TLOGOMAS
TERHADAP PENANGGULANGAN COVID-19**

SKRIPSI

ADMINISTRASI PUBLIK



Disusun oleh:

Maria Felisia Oktaviana Tiwu

2017210091

**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2020

Ringkasan

Kebijakan publik adalah produk hukum yang berupa aturan-aturan mengenai pernyataan, himbauan atau ajakan yang dibuat pemerintah untuk masyarakatnya. Sehingga akan memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung bagi semua pihak masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, fokus penelitian ini yaitu implementasi kebijakan kelurahan tlogomas dan implementasi terhadap penanggulangan covid-19, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa Implementasi Kebijakan Kelurahan Tlogomas Terhadap Penanggulangan Covid-19 yaitu membentuk satgas penanggulangan covid-19, Para relawan Kelurahan tangguh, Membuat pos- pos di RT/RW, Pelayanan di Kelurahan dengan pembentukan sarana dan prasarana penangulangan covid-19 antara lain: pembagian masker, pembatasan pelayanan yang melibatkan banyak orang, setiap seminggu sekali melakukan penyemprotan diarea kerja, Penyediaan bilik desinfektan dan penyediaan hand saitizer.

Kata Kunci: Kebijakan, Kelurahan, Penanggulangan Covid-19.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan publik sangatlah penting, untuk pemerintah sebagai implementator kebijakan dan penting untuk masyarakat, dimana fungsi dari kebijakan publik itu sendiri ialah untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi dilingkungan masyarakat. Maka dari itu setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah perlu juga adanya partisipasi aktif dari masyarakat .

Kebijakan adalah cara yang dibuat pemerintah untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Cara yang digunakan pemerintah untuk menyelesaikan menyelesaikan permasalahan dalam bentuk aturan atau hukum yang didalamnya memuat ajakan atau himbuan untuk masyarakat tentang tujuan dari kebijakan yang dibuat untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang tengah dihadapi masyarakat. Sehingga tujuan dan kesejahteraan bersama dapat tercapai.

Dalam kebijakan publik terdapat sisi positif dan sisi negatif. sisi positifnya pemerintah bukan hanya membuat kebijakan tetapi juga mengambil peran dan melaksanakan tindakan guna menuntaskan masalah atau persoalan yang terjadi. Sisi negatifnya pemerintah tidak ikut berperan penting untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Beberapa bentuk kebijakan pemerintah yang ada di Indonesia diantaranya berupa Undang-Undang Dasar (UUD), Keputusan Presiden , Peraturan Menteri, Peraturan Daerah. Sehingga kebijakan publik yang ada di Indonesia sangat beragam tergantung jumlah pemerintahan, jumlah masyarakat

yang berpartisipasi dalam kebijakan dan jumlah persoalan yang menarik perhatian publik dan hendak diselesaikan oleh kebijakan tersebut.

Kebijakan publik merupakan jawaban dari sistem politik yang ada, yang berfungsi untuk mengelola dan menyelesaikan masalah, kepentingan masyarakat. Kebijakan publik memerlukan pergerakan yang sangat besar dari sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, Sehingga kebijakan tidak mengalami kegagalan dan tujuan kebijakan publik dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan keputusan bersama.

Dalam kebijakan publik antara pemerintah sebagai implementor kebijakan publik dengan masyarakat saling berhubungan. Sehingga apa yang dilakukan pemerintah sama halnya dengan yang dilakukan masyarakat. Dimana keberhasilan suatu kebijakan ditentukan dari tingginya partisipasi masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat, begitu pula jika partisipasi masyarakat rendah maka akan gagal pula kebijakan yang dibuat.

Ada tiga unsur kebijakan publik yang paling penting dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dimana terdapat pemerintah sebagai pembuat kebijakan, pihak yang memberi persetujuan layak dan tidaknya kebijakan itu ditetapkan dan apabila dalam kebijakan melibatkan banyak orang dapat dirumuskan dalam undang-undang, asumsi bahwa dalam kebijakan harus ada diskusi, perdebatan dan kompromi apakah layak atau tidak kebijakan itu dibuat.

Pada umumnya perencanaan dan kebijakan publik jauh lebih penting dari pada implementasinya. Kebijakan publik memiliki nilai lebih besar, sedangkan implementasi kebijakan memiliki nilai lebih kecil dari kebijakan publik. Dengan

demikian kebijakan publik yang baik sebenarnya sudah memberikan kesempurnaan dan akan memberikan dampak yang baik terhadap warga negara yang menjadi cakupan. Sedangkan sisanya tergantung pada bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan. Dalam konteks implementasi memiliki peran sentral, artinya sebaik-baik kebijakan publik disusun hasilnya tetap nihil jika tidak diimplementasikan. (Nugroho 2009:618).

Riant Nugroho (2010:15) mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan amanah menjalankan penerapan kebijakan yang sudah ditetapkan secara tepat dalam rangka mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Implementasi mencakup “proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. (Cleaves dalam wahab 2008:187).

Kebijakan (policy) harus dibedakan dari kebijaksanaan (wisdom). Kebijaksanaan merupakan pelaksanaan atau manifestasi dari aturan yang ditetapkan sesuai situasi setempat oleh pejabat yang berwenang. Kebijakan publik merupakan jawaban terhadap suatu persoalan yang dengan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah keburukan yang sudah, sedang, dan akan terjadi. (Syafiie dalam setiawan 2006:104).

Seluruh dunia sekarang tengah menghadapi wabah Covid-19 yang penyebarannya sangatlah cepat, bahkan hampir seluruh belahan dunia mengalami dampak yang besar akibat dari Covid-19 ini. Penyebaran virus ini juga dirasakan

oleh negara Indonesia, sejak tanggal 2 Maret covid-19 melanda Indonesia dan sudah banyak orang yang terinfeksi oleh virus ini. Penyebaran yang begitu masif di seluruh wilayah Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam pencegahan pandemi ini ,seperti kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), karantina dan isolasi bagi pasien positif, PDP (Pasien Dalam Perawatan), ODP (Orang Dalam Pengawasan), serta larangan mudik , sehingga kebijakan ini sangat berdampak pada masyarakat lapisan kelas bawah.

Kelurahan Tlogomas yang berada di wilayah kota Malang yang termasuk zona merah dari penyebaran covid-19, harus memaksa pemerintah kota Malang untuk memberlakukan kebijakan PSSB (Kebijakan Sosial Berskala Besar), dengan adanya kebijakan ini akan sangat berdampak besar pada masyarakat dan akan mempengaruhi roda perekonomian dan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu kebijakan pemerintah ini perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk mengatasi dampak dari covid-19 .

Pada masa pandemi covid-19 banyak kita kenal istilah lembaga sosial, dimana jenis-jenis lembaga sosial itu, seperti lembaga pendidikan, lembaga politik, lembaga kesehatan, lembaga ekonomi, lembaga agama yang notabene lembaga-lembaga ini tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari.Melihat situasi dan kondisi sekarang begitu banyak lembaga sosial yang mengambil perannya dalam menjawab dan mampu memberi solusi pada setiap masalah yang terjadi di masyarakat, khususnya masalah pandemi, implementasi kebijakan pemerintah dalam menghadapi covid-19 sangat dibutuhkan masyarakat.

Angka covid-19 tidak pernah turun bahkan selalu naik, sehingga masyarakat sangat membutuhkan implementasi atau upaya kebijakan pemerintah dalam menangani masalah yang tengah dihadapi (COVID-19). Maka pemerintah kelurahan tlogomas dalam upaya menangani covid-19 bekerja sama dengan pihak swasta dan lembaga kesehatan yang bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat dalam masa pandemi seperti pembagian sembako, uang tunai, dan bekerja sama dengan dokter rumah sakit untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan, menyediakan Satgas, melakukan kegiatan pembagian masker kepada masyarakat, dan membagikan desinfektan dan antiseptik bagi masyarakat. Berdasarkan latar belakang penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan menetapkan judul **“Implementasi Kebijakan Kelurahan Tlogomas Terhadap Penanggulangan Covid-19”**.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah cara untuk mencari sesuatu dalam rangka perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan Kelurahan Tlogomas terhadap penanggulangan covid-19.
2. Apa faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi pemerintahan Kelurahan Tlogomas terhadap penanggulangan covid-19.

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat dari latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Mengetahui implementasi kebijakan Kelurahan Tlogomas terhadap penanggulangan covid-19.
- 2) Mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung kebijakan Kelurahan Tlogomas terhadap penanggulangan covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

1 Secara Teoritis

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan pembaca.
- b. Sebagai bahan referensi dan pembanding bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis: Penelitian ini berguna untuk meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan penulis, dalam bidang implementasi kebijakan publik.
- b. Bagi Masyarakat: Sebagai informasi bagi masyarakat untuk mengetahui kebijakan Kelurahan Tlogomas terhadap penanggulangan covid-19 serta sebagai pedoman bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan covid-19.
- c. Bagi Pemerintah: Penelitian ini berguna untuk pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan dan penerapan di masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Grindle, Merilee, (ed) 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton, New Jersey:Princeton.
- J. Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif. Pt Remaja Rosdakarya*: Bandung.
- _____.2015. *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Makmur dan Rohana Thahier.2016.*Konseptual dan Kontekstual Administrasi dan Organisasi Terhadap Kebijakan Publik*.Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Nugroho.2009. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta:PT. Elex Media Komputindo.
- Ripley, Randall B. And Grace A. Franklin.1982. *Bureaucracy and Policy Implementation*.Homewood, Illinois: The Dorsey Press.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. PT Alfabart: Bandung.
- _____.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*.
- Setyawan Dody.2017.*Pengantar Kebijakan Publik*.Malang: Inteligensia Media.
- Syafiie.2006. *Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi)*. Cet. II. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Wahab.2012.*Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan, Model –Model implementasi Kebijakan Publik*.Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wahyudi,dkk. 2008. *Memahami Kebijakan Publik dan Strategi Advokasi: Sebuah Panduan Praktis* . Malang: Intrans Publishing.
- Wibawa.2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Internet

- Antonius Purwanto. 2020. *Meruntut Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 Diindonesia*. <https://kompaspedia.kompas.id> (diakses pada 03 juli 2020).

Erik Erfinanto. 2020. *Ragam Upaya Tentang Penanggulangan Covid-19 Di Jawa Timur*. <https://m.liputan6.com> (diakses pada 07 juli 2020).

Zainul Arifin. 2020. *Ragam Peraturan PSBB Dimalang Raya, Sanksi Hingga Bantuan sosial*. <https://m.Liputan6.com> (Diakses pada 16 Mei 2020).

Jurnal

Heri Kurniawansyah, dkk 2020. Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari Covid-19 Pada Masyarakat Rentan Di Indonesia. *Jurnal Of Social Sciences And Humanities*. Vol.1

Ibrahim Imam Seputra 2020. Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Penanggulangan Covid-19 Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. *Jurnal Ilmu Pengetahuan*. Vol.7

Nur Rohim & Annissa 2020. Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *Jurnal Sosial & Budaya*. Vol.7